

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PERDA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08
TAHUN 2016 PASAL 14 TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

ADE GUSMAN PANGESTU

Npm : 1421020043

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PASAL 14
TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik
Kabupaten Lampung Timur)**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

Ade Gusman Pangestu

NPM. 1421020043

Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Pembimbing I : Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.

Pembimbing II : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2019 M**

ABSTRAK

. Untuk memilih keanggotaan didalam Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 14 ayat (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah Gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa. Sistem Pemilihan keanggotaan didalam BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT), serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Gunung Agung, mendapatkan gambaran bahwa pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Agung telah dilaksanakan pada tanggal 12 februari 2019. Di dalam fiqh siyasah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan lembaga *Ahlu al-ahlli wa al-'aqdi*. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahlu al-ahlli wa al-'aqdi* sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).

Maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah: Bagaimana pelaksanaan dari Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Bagaimana perspektif *fiqh siyasah* terhadap Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan dari Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa dan untuk menganalisis perspektif *fiqh siyasah* terhadap Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Agung. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu subjek pemikiran untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan dari Pemilihan Anggota BPD, Teknik pengumpulan data didapat dari data primer yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat di desa Gunung Agung dan data sekunder yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, ensiklopedia dan lainnya.

Didalam pemilihan Anggota BPD, Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 12 februari 2019, telah menjalankan aturan yang telah dibuat di dalam pemilihan anggota BPD, yaitu keterwakilan wilayah, penduduk dan keuangan desa, namun belum dapat menjalankan aturan perundang-undangan tentang keterwakilan perempuan pada BPD. Dikarenakan dari hasil pemilihan, tidak ada seorang perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD. Dari hasil penelitian yang penulis amati, bukan tidak ada perempuan yang mencalonkan diri, tetapi masyarakat di

desa Gunung Agung lebih memilih laki-laki untuk menduduki kursi anggota BPD, masyarakatpun kurang mendapatkan informasi tentang aturan keterwakilan perempuan dalam BPD. Dari pandangan fiqh siyasah seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, di dalam pemilihan anggota BPD Desa Gunung Agung belum sepenuhnya menjalankan aturan yang telah dibuat khususnya untuk keterwakilan perempuan, dalam Islam ketika tidak ada keterwakilan perempuan tidak menjadi masalah begitupun ketika ada, Islam memperbolehkan dan membenarkannya, namun bila dilihat dari aturan perundang-undangan aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal sanksi apabila tidak dilaksanakan.





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara.

Nama : Ade Gusman Pangestu

NPM : 1421020043

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Judul : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag.
NIP.1957070519890310001

Pembimbing II

Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.
NIP.1974081620031220004

Mengetahui

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara

Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP.197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PASAL 14 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).** Disusun oleh Ade Gusman Pangestu, NPM.1421020043, Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), telah diujikan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, pada hari/tanggal: 24 September 2019

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : H. Rohmat., S.Ag. M.HI. (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati., S.H.I., M.E.I (.....)

Penguji Utama : Drs. Henry Iwansyah., M.A. (.....)

Penguji II : Agustina Nurhayati., S.Ag. M.H (.....)

Pendamping I : Dr. Bunyana Sholihin, M.Ag (.....)

Pendamping II : Agustina Nurhayati., S.Ag. M.H (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



H. Khairuddin, M.H
NIP.197009011997031002

MOTTO

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾ (الشعرا: ٣٨)

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka. (Qs. Asy-Syura 42:38).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang selalu menjadi motivasi hidup penulis pribadi guna menjadi manusia yang lebih baik, diantaranya:

1. Kedua Orangtuaku bapak Agus Sumantri dan Ibu Neneng Astuti Ascar yang senantiasa penulis cintai dan banggakan yang selama ini juga telah mendidik, membimbing, serta memberikan motivasi baik moril maupun materiil dan tak pernah lupa selalu memberikan doa yang tiada henti-hentinya kepada diri penulis agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat banyak.
2. Untuk mbakku Astri Puspita Rani Adekku Amelia Wijayanti dan Yuliana Sari yang selalu jadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan menjadi panutan selaku anak lelaki tertua serta menjadi kebanggaan Keluarga Besar penulis.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Ade Gusman Pangestu. Penulis dilahirkan di Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Lampung Timur, pada tanggal 25 Maret 1996, anak Kedua dari 3 (tiga) bersaudari Astri Puspita Rani dan Amelia Wijayanti, putra dari pasangan Agus Sumantri dan Ibu Neneng Astuti Ascar.

Riwayat Pendidikan penulis, yaitu:

1. Taman Kanak-Kanak (TK) di TK Pertiwi Gunung Agung, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2002.
2. Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri Gunung Agung, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2008.
3. Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri Terbuka Gunung Agung, Lampung Timur dan lulus pada tahun 2011.
4. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Tanjung Sari, Lampung Selatan dan lulus pada tahun 2014.
5. Pada tahun 2014 penulis melanjutkan jenjang pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Siyash Syar'iyyah (Hukum Tata Negara).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, Sang Maha Pencipta semesta alam yang telah memberikan nikmat pemahaman, kesehatan, serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”. sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana hukum dalam Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk ini penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., beserta staff dan jajaranya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Dr. H. Khairudin, M.A. , beserta staff dan jajaranya.
3. Ketua Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.Ag. ,serta Sekretaris Jurusan Siyasah Syar’iyyah (Hukum Tata Negara) Frengki, M. Si.

4. Pembimbing I Dr. H. Bunyana Sholihin, M.Ag, dan Pembimbing II Agustina Nurhayati, S.Ag, M.H yang telah banyak meluangkan waktu serta memberikan masukan dan bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen serta Karyawan Fakultas Syari'ah.
6. Warga masyarakat Desa Gunung Agung yang telah membantu di dalam penelitian ini hingga selesai.
7. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasa Syar'iyyah (Hukum Tata Negara) yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan Moril dari awal hingga terselesaikanya Skripsi ini.
8. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga ilmu yang kalian berikan menjadi manfaat.

Akhir kata jika ditemui ada kesalahan dan kelalaian didalam penulisan skripsi ini penulis memohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun, semoga karya ini dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Bandar Lampung, 16 Agustus 2019

Ade Gusman Pangestu
NPM. 1421020043

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian.....	10

BAB II BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah.....	17
B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	21
C. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah.....	24
D. <i>Ahlu Al-Halli Wa Al-Aqdi</i> /Badan Permusyawaratan	28
E. Teori Perwakilan	41
F. BPD menurut peraturan perundang-undangan Indonesia	43

BAB III IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PASAL 14 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Gambaran Umum Desa Gunung Agung, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur	49
1. Sejarah Desa Gunung Agung	49
2. Keadaan Geografis Desa Gunung Agung	50

3. Keadaan Demografi Desa Gunung Agung.....	52
4. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Agung.....	54
B. Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur	55

BAB IV PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD DESA GUNUNG AGUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 didalam pengisian keanggotaan BPD Desa Gunung Agung.....	63
B. Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 didalam pengisian keanggotaan BPD Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Perspektif Fiqh Siyasah.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)”**.

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul tersebut maka perlu penegasan dan penjelasan dari istilah-istilah yang terkandung dalam judul ini secara rinci sehingga mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

1. Tinjauan Fiqh Siyasah

- a. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.²

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan Fiqh Siyasah adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang

²Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, (Jakarta:Erlangga, 2008), h.11.

pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

2. Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016
Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa

- a. Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) implementasi adalah pelaksanaan, penerapan.³
- b. Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa yang mulai berlaku pada tanggal diundangkannya pada tanggal 1 Juni 2016.
- c. Pasal 14, yaitu suatu pasal yang terdapat di Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 bagian keempat tentang keanggotaan BPD, yang membahas bagaimana penetapan keanggotaan didalam BPD.
- d. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁴

Jadi yang dimaksud dengan Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu suatu aturan untuk memilih keanggotaan didalam Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). h.

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat (4).

keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan istilah-istilah di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa** yaitu bagaimana pemilihan anggota didalam Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang dilihat dari sudut pandang ilmu tata negara Islam.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan penulis begitu pentingnya judul ini untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Di dalam Pemilihan keanggotaan BPD di Desa Gunung Agung telah dijalankan dengan baik oleh panitia pembentuk Badan Permusyawaratan Desa, namun didalam pelaksanaannya belum sepenuhnya menjalankan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 pasal 14 tentang unsur-unsur keterwakilan.

2. Alasan Subyektif

- a. Pembahasannya sesuai dengan bidang studi yang ditekuni untuk menambah wahana keilmuan bagi penulis pada umumnya.

- b. Sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, Pemerintah Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Nasional yang langsung berada dibawah Pemerintah Kabupaten.

Pemerintah desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan kewenangan untuk mengurus wilayahnya. Dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahannya sendiri, yaitu Kepala Desa beserta Perangkat Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan Pemerintah Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja kepala desa, serta

bersama-sama dengan kepala desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).⁵

Untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa, pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 1 Juni 2016.

Untuk memilih keanggotaan didalam Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dalam Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 14 ayat (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah Gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan desa.⁶

Dilihat dari aturan diatas, didalam pemilihan anggota BPD harus memiliki 4 aspek yang mesti terpenuhi, selain dari persyaratan menjadi anggota BPD yang tercantum dalam pasal 7 yaitu:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

⁵ Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 61

⁶Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 tahun 2016 tentang Badan permusyawaratan Desa pada Pasal 14 ayat (1) .

- e. bukan sebagai Perangkat Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
- g. wakil penduduk yang dipilih secara demokratis;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. berkelakuan baik;
- j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- k. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun berturut-turut.

Sistem Pemilihan keanggotaan didalam BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah desa yang dihadiri oleh kepala desa, kepala dusun, tokoh masyarakat, ketua Rukun Tetangga (RT), serta perwakilan masyarakat dari setiap dusun. Dilaksanakan oleh panitia yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang.⁷ Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.

Didalam fiqh siyasah kedudukan Badan Permusyawaratan Desa sama dengan lembaga *Ahlu al-ahlli wa al-‘aqdi*. Para ahli fiqh siyasah merumuskan pengertian *Ahlu al-ahlli wa al-‘aqdi* sebagai orang yang memiliki

⁷ Permendagri Nomer 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 9 Ayat (2).

kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga negara).⁸ Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku dan melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawas yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik, bahwa pemilihan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Gunung Agung telah dilaksanakan pada tanggal 12 februari 2019 yang berlokasi di balai desa. Dengan membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD yang beranggotakan 3 orang dari aparatur desa dan 9 orang yang berasal dari masyarakat desa, yang pembentukannya dilakukan sebelum tanggal pemilihan anggota BPD yaitu pada akhir tahun 2018 dengan surat keputusan kepala desa.

Tugas dari panitia pengisian keanggotaan BPD adalah mensosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat di desa gunung agung bahwa akan di adakannya pemilihan anggota BPD dengan menjelaskan syarat-syarat yang telah di atur didalam Perda kabupaten Lampung Timur

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.158

Nomor 08 tahun 2016 pasal 7, dan juga memiliki tugas sebagai penyeleksi calon anggota BPD.

Masyarakat di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik diwajibkan mencalonkan beberapa orang dari setiap dusun untuk maju menjadi calon anggota BPD, dan setiap calon yang telah diajukan ke panitia pengisian keanggotaan BPD akan di seleksi lalu dipilih secara demokratis, baik itu secara musyawarah mufakat ataupun melalui voting.

Apa yang telah terjadi di Desa Gunung Agung membuat penulis mendorong untuk memecahkan masalah yang timbul melalui karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawarata Desa (Studi di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur).**

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan dari Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana pelaksanaan terhadap Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di

Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur perspektif fiqh siyasah?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan dari Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawarata Desa di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik kabupaten Lampung Timur
- b. Untuk mengetahui perspektif fiqh siyasah terhadap Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

2. Kegunaan Penelitian

a. Dari aspek teoritis

Hasi penelitan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum positif maupun hukum Islam selebihnya untuk dipergunakan sebagai bahan bacaan (literatur) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

b. Dari aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pendorong perkembangan pemikiran ilmiah dan sebagai bahan

rujukan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat luas, serta untuk memperluas wawasan bagi penulis.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk data penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif dan mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, lembaga masyarakat.⁹

Jadi penelitian lapangan adalah penelitian yang mengangkat data dan permasalahan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini menjelaskan realitas yang ada yaitu tentang bagaimana pelaksanaan pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Desa.¹⁰

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode mendalam tentang suatu subjek pemikiran. Penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan data penelitian yang sebenarnya dan yang obyektif.¹¹ Melalui metode deskriptif analitis ini akan digambarkan bagaimana pelaksanaan dari pemilihan anggota pada Badan Permusyawaratan Desa perspektif fiqh siyasah.

⁹Sopiah Etta Mamang Sanggaadji, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2010), h.24

¹⁰*Ibid.*,

¹¹Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1985),h.38

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dianggap data utama dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian baik perorangan atau organisasi.¹² Data primer penelitian ini menggunakan responden dan informan dalam menghimpun data-data yang dibutuhkan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat di desa Gunung Agung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis.¹³ Adapun referensi yang penulis gunakan yaitu pada data ini penulis berusaha mencari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik, rancangan undang-undang, ensiklopedia dan lainnya.

Sedangkan data yang termasuk dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan pemilihan keanggotaan pada Badan Permusyawaratan Desa, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data

¹²Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2015),h.6

¹³Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).h.8

primer dalam penelitian ini. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber buku majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi.¹⁴

4. Metode Pengumpulan Data

a. Metode observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran untuk menangkap gejala yang diamati.¹⁵

b. Metode wawancara (*interview*)

Metode Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan kepada tujuan penelitian.¹⁶ Melakukan tanya jawab kepada sasaran penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat dari informan dan responden melalui kuisioner.

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan metode wawancara santai (tidak terstruktur) dengan beberapa orang yang memang berkapasitas dan patut untuk dimintai keterangan mengenai permasalahan yang peneliti ambil. Responden yang di wawancarai

¹⁴ Lexy J.Noleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.159.

¹⁵Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), h.70.

¹⁶Muhamad Iqbal, *Op.cit.*, h.85.

adalah Kepala Desa, sekertaris desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait di desa gunung agung.

c. Metode dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹⁷ Metode dokumentasi ini yaitu tahapan untuk mengumpulkan data-data variabel yang berbentuk tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, traskip, buku, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan tema penelitian.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data yang diperlukan dengan melalui catatan tulis. Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang sistem pemilihan BPD, cara pemilihan, tentang orang yang dapat memilih BPD, struktur organisasi BPD, jumlah anggota BPD serta beberapa catatan yang berkaitan dengan BPD.

5. Populasi

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dan seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.¹⁸ Dalam skripsi ini populasinya adalah seluruh masyarakat Desa Gunung Agung.

¹⁷Muhammad Iqbal, *Ibid.*, h.112

¹⁸ Juliansyah, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.147.

6. Sampel

Dalam hal menentukan sampel, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan atas tujuan tertentu.¹⁹ Yakni untuk memiliki responden dengan masalah yang tepat, relevan, dan kompeten dengan masalah yang dipecahkan. Sampel yang penulis dapati di desa Gunung Agung ber-jumlah 13 orang yang terdiri dari Kepala Desa, sekertaris desa, kepala dusun, ketua RT, Tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat yang terkait di desa gunung agung.

7. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu, data yang kemudian dikumpulkan kemudian diolah, pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan.²⁰
- b. Koding, yaitu mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari pada responden kedalam kategori-kategori,²¹ atau memberikan catatan atau tanda yang menyatakan sumber data atau urutan rumusan masalah.

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 1997), h.55

²⁰Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), h.115

²¹ Susiadi, *Ibid*, h.115

- c. Rekonstruksi data, yaitu menyusun ulang data secara teratur berurutan dan sistematis.
- d. Sistematis data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahan berdasarkan urutan masalah.²²

Setelah data terkumpul, dikoreksi, dievaluasi dan diolah sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur sehingga menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami, dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sehingga dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.

8. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui instrumen penelitian dimaksudkan untuk mengetahui atau menjawab dari pokok-pokok masalah dalam penelitian ini. Analisis data ini digunakan untuk mengolah data yang telah ditemukan peneliti selama melakukan penelitian yang nantinya akan dirumuskan dan dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian deskriptif ini bertujuan memberikan gambaran mengenai situasi yang terjadi dengan menggunakan analisa kualifikasi yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu bentuk

²² Abdul Kadir Muhammad, *Op.Cit.*, h.45

menerangkan hasil penelitian yang bersifat memaparkan sejelas-jelasnya tentang apa yang diperoleh di lapangan, dengan cara melukiskan, memaparkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.²³



²³ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.34

BAB II

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH

A. Pengertian Fiqh Siyasah

Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud Fiqh Siyasah. Maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Kata *fiqh Siyasah* berasal dari dua kata yaitu kata *Fiqh* dan yang kedua yaitu *al-Siyasi*. Kata *Fiqh* secara bahasa adalah faham, sedangkan kata *al-siyasi* yang artinya adalah mengatur.²⁴

Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*).²⁵ Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh juga dapat disebut sebagai hukum Islam, karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia.

²⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h.21.

²⁵ *Ibid.*, h.23.

Secara *etimologis* (bahasa) kata Siyasah merupakan bentuk *masdar* (asal) dari *sasa*, *yasusu* yang artinya “mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin, memerintah, politik dan pembuatan kebijaksanaan”.²⁶

Adapun dilihat dari segi terminologinya (istilah) kata siyasah disini terdapat macam perbedaan menurut pendapat dikalangan ahli hukum Islam, antara lain yaitu:²⁷ *Pertama*, Ibnu Manzhur, menurut beliau siyasah berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.²⁸ *Kedua*, Abdul Wahhab Khalaf, menurut beliau definisi dari siyasah yaitu sebagai Undang-Undang yang dibuat untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal.²⁹ *Ketiga*, Abdurrahman, menurut beliau siyasah sebagai hukum dan peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan Negara lain.³⁰

Dengan demikian dari uraian tentang pengertian fiqh dan siyasah dari segi etimologis, terminologi serta definisi-definisi yang dikemukakan para ahli hukum Islam, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal-ihwal dan seluk-beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³¹

²⁶ *Ibid.*, h.24

²⁷ Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h.7.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), h.45

²⁹ Imam Amrusi Jailani, *Op.Cit.*, h.8

³⁰ *Ibid.*, h.8

³¹ Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h.26.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan atas kekuasaannya.³²

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menurut Prof. H.A. Djazuli, menyatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.³³ Melihat kedua unsur tersebut, Yaitu negara yang pemerintahnya bersifat eksekutif dan unsur masyarakat.³⁴ Akan tetapi, jika dilihat dari segi fungsinya, *Fiqh Siyasah* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang di nukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (*khidmah*), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan (*ishlah*). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.³⁵

Ini juga dibuktikan dengan definisi politik di dalam Penguin Encyclopedia: "*Political Science: the academic discipline which describes and analyses the operations of government, the state, and other political organizations, and any other factors which influence their behavior, such as economics. A major concern is to establish how power is exercised and by whom, in resolving conflict within society*"³⁶

³²Munawir Sadjali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1991), h.3

³³H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), h.28

³⁴Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, (Bandung: eresco, 1971),

³⁵H. A. Djazuli, *Op.Cit.* h.28

³⁶David Crystal, *Penguin Encyclopedia*, (Penguin Books: London, 2004), h.1219.

Apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah ilmu politik: disiplin akademis yang menggambarkan dan menganalisa operasi pemerintah, negara, dan organisasi politik lainnya, dan faktor lain yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti ekonomi. Perhatian utama adalah untuk menetapkan bagaimana kekuasaan dilaksanakan dan oleh siapa, dalam menyelesaikan konflik di dalam masyarakat. Ternyata, memang didalam definisi ilmu politik disini tidak disinggung sama sekali tentang kemasalahatan untuk rakyatnya atau masyarakat secara umum.

Perbedaan tersebut tampak apabila disadari bahwa dalam menjalani politik di dalam hukum Islam haruslah terkait oleh kemestian untuk senantiasa sesuai dengan syariat Islam, atau sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok syariah yang *kulli*. Dengan demikian, rambu-rambu *fiqhsiyasah* adalah: 1. Dalil-dalil *kulli*, baik yang tertuang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad Saw; 2. *Maqashid al-syari'ah*; 3. Kaidah-kaidah usul fiqh serta cabang-cabangnya.³⁷

Oleh karena itu, politik yang didasari adat istiadat atau doktrin selain Islam, yang dikenal dengan *siyasah wadl'iyah* itu bukanlah fiqhsiyasah, hanya saja selagi *siyasah wadl'iyah* itu tidak bertentangan dengan prinsip Islam, maka ia tetap dapat diterima.³⁸

³⁷ H. A. Djazuli, *Op.Cit.*, h.28.

³⁸ H. A. Djazuli, *Op.Cit.*, h.28.

B. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu fikih. Bahasan ilmu fikih mencakup individu, masyarakat, dan negara; meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.³⁹ Fikih siyasah mengkhususkan diri pada bidang-bidang mu`amalah dengan spesialisasi segala hal ikhwal dan seluk beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan.⁴⁰

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun tidaklah terlalu prinsipil, karena hanya bersifat teknis. Berikut menurut Imam Al-Mawardi, didalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup sebagai berikut:⁴¹

1. *Siyasah Dusturiyyah* (Politik Pembuatan Undang-Undang)
2. *Siyasah Maliyyah* (Politik Ekonomi dan Moneter)
3. *Siyasah Qadha'iyah* (Politik Peradilan)
4. *Siyasah Harbiyyah* (Politik Peperangan)
5. *Siyasah Idariyyah* (Politik Administrasi Negara)

³⁹ Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Bulan Bintang: Jakarta, 1974), h.30.

⁴⁰ Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2014), h.38.

⁴¹ Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.14.

Menurut Abdul Wahab Khalaf berpendapat fiqh siyasah adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Abdul Wahhab khali'af membagi fiqh siyasah dalam 3 bidang kajian saja, yaitu:⁴²

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Dauliyyah*
3. *Siyasah Maliyah*

Sementara Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-siyasahal-shar'iyyah*, ruang lingkup fiqh siyasah adalah sebagai berikut:⁴³

1. *Siyasah Qadhaiyyah*
2. *Siyasah Idariyyah*
3. *Siyasah Maliyyah*
4. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*

Berbeda dengan tiga pemikir diatas, salah satu ulama termuka di Indonesia T.M. Hasbi Ashiddiegy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, yaitu:⁴⁴

1. *Siyasah Dusturiyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Tentang Peraturan Perundang-Undangan).
2. *Siyasah Tasyri'iyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Tentang Penetapan Hukum).
3. *Siyasah Maliyyah Shar'iyyah* (Kebijaksanaan Ekonomi Dan Moneter).

⁴²*Ibid.*,15

⁴³*Ibid.*,15

⁴⁴Hasby Ash-Shiddiegy, *Op.Cit.*, h.40.

4. *Siyasah Qadhaliyyah Shar'iiyyah* (Kebijaksanaan Peradilan).
5. *Siyasah Idariyyah Shar'iiyyah* (Kebijaksanaan Administrasi Negara).
6. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar'iiyyah* (Kebijaksanaan Luar Negeri dan Hubungan Internasional).
7. *Siyasah Tanfidziyyah Shar'iiyyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang).
8. *Siyasah Harbiyyah Shar'iiyyah* (Politik Peperangan).

Berdasarkan perbedaan diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga pokok, yaitu:⁴⁵

1. *Siyasah Dusturiyyah*, disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasyri'iiyyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadhaiyyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2. *Siyasah Dauliyah/Siyasah Kharijiyyah*, disebut juga politik luar negeri. Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siyasah Harbiyyah*, yang mengatur etika peperangan, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

⁴⁵ Imam Amrusi Jailani, *Op.Cit.*, h.16

3. *Siyasah Maliyyah*, disebut juga politik keuangan dan moneter. Membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah Dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyah*. Arti *siyasah* dapat kita lihat di pembahasan di atas, sedangkan *Dusturiyah* adalah undang-undang atau peraturan. Secara umum *siyasah dusturiyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat.⁴⁶ Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (*konvensi*) maupun tertulis (*konstitusi*).

Dalam buku *fiqh siyasah* karangan J. Suyuthi Pulungan definisi dari *Siyasah Dusturiyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang di ambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *siyasah dusturiyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya.⁴⁷

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, didalam *fiqh*

⁴⁶Agustina Nurhayati, *Op.Cit.*,h.42.

⁴⁷Suyuthi Pulungan, *Op.Cit.*, h.39.

siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang ditentukan oleh *hal ikhwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁸

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok; pertama, dalil-dalil *kulli*, baik ayat-ayat Alquran maupun hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulli* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.⁴⁹ *Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi kepada:⁵⁰

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlu halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dengan non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

⁴⁸Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.177.

⁴⁹H. A. Djazuli, *Op.Cit.* h.48.

⁵⁰*Ibid.*,

4. Bidang *siyasaḥ idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

Ulama-ulama terdahulu umumnya lebih banyak berbicara tentang pemerintahan dari pada negara, hal ini disebabkan antara lain oleh:⁵¹

1. Perbedaan antara negara dan pemerintahan, hanya mempunyai arti yang teoritis dan tidak mempunyai arti yang praktis sebab setiap perbuatan negara di dalam kenyatannya adalah perbuatan pemerintah, bahkan lebih kongkret lagi orang-orang yang disertai tugas untuk menjalankan pemerintahan. Sedangkan para fuqoha/ulama menitikberatkan perhatian dan penyelidikan kepada hal-hal praktis.
2. Karena sangat eratnya hubungan antara pemerintahan dan negara, negara tidak dapat berpisah dari pemerintahan, demikian pula pemerintah hanya mungkin ada sebagai organisasi yang disusun dan digunakan sebagai alat negara.
3. Kalau fuqoha lebih tercurah perhatiannya kepada negara (imam), karena yang kongkret adalah orang-orang yang menjalankan pemerintahan, yang dalam hal ini dipimpin oleh kepala negara (imam).
4. Fakta sejarah Islam menunjukan bahwa masalah yang pertama dipersoalkan oleh umat Islam setelah Rasulullah wafat adalah masalah kepala negara, oleh karena itu logis sekali apabila para fuqoha memberikan perhatian yang khusus kepada masalah kepala negara dan pemerintahan ketimbang masalah kenegaraan lainnya.

⁵¹Ibid., h.49.

5. Masalah timbul dan tenggelamnya suatu negara adalah lebih banyak mengenai timbul tenggelamnya pemerintahan daripada unsur-unsur negara yang lainnya.

Walaupun demikian, ada juga di antara para fuqoha dan ulama Islam yang membicarakan pula bagian-bagian lainnya dari negara, seperti Al-farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, dan Ibnu Khaldun.⁵²

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitutional* dalam bahasa Inggris, atau Undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dustur*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturi*, merupakan untuk penyebutan suatu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam *dustur* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di dalam pemerintahan suatu negara, sebagai *dustur* dalam suatu negara sudah tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah dan tidak boleh bertentangan dengan *dustur* tersebut.⁵³

Prof. H. A. Dzajuli menyebutkan bahwasannya sumber *fiqh dusturiyah* ada lima yakni:⁵⁴

1. Al-Quran al-Karim
2. Hadist, terutama yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan Rasulullah SAW dalam menerapkan hukum.

⁵²*Ibid.*,

⁵³*Ibid.*, h.53

⁵⁴*Ibid.*, h.54

3. Kebijakan-kebijakan Khulafa Al Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun berbeda satu sama lain namun tujuannya sama yakni kemaslahatan rakyat.
4. Ijtihad para ulama seperti *Al Maqasid al-sittah* (6 tujuan hukum islam) yaitu *hifdh al din* (memelihara agama), *hifdh al nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al aal* (memelihara akal), *hifdh al mal* (memelihara harta), *hifdh al nash* (memelihara keturunan), *hifdh al ummah* (memelihara umat).
5. Adat istiadat suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist.

Menurut Suyuti Pulungan bahwa objek kajian fiqh siyasah adalah mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala masalah dan seluk beluk tata pengaturan Negara dan pemerintahan.⁵⁵Selain itu ada yang berpendapat bahwa, kajian dalam bidang Siyasah Dusturiyah itu terdiri konstitusi, legislasi dan Syura atau demokrasi.

D. Ahlu al-Halli wa al-Aqdi/ Badan Permusyawaratan

1. Definisi Ahlu al-Halli wa al-Aqdi

Istilah *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* berasal dari tiga suku kata, yaitu *ahlun*, *hallun* dan *aqdun*. Kata *ahlun* berarti ahli atau famili atau keluarga, sedangkan kata *hallun* berarti membuka atau menguraikan, sementara kata *aqdun* memiliki arti perjanjian. Dari ketiga suku kata tersebut dapat

⁵⁵*Ibid.*,

dirangkai menjadi sebuah kata (istilah) yang mempunyai arti “orang-orang yang mempunyai wewenang melonggarkan dan mengikat”.⁵⁶

Bibit konsep *Ahlu Halli wa al-Aqdi* pertama kali muncul dalam masa Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab, sebelum kewafatannya menunjuk enam orang sahabat yang menjadi tim formatur untuk memilih Khalifah setelah beliau, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abi Waqash, Abdu al-Rahman bin Auf, Zubair bin Al-awwam, dan Thalhah bin Ubaidillah serta Abdul bin Umar. Abdullah bin Umar hanya bertindak sebagai penasihat, dan tidak berfungsi sebagai calon.⁵⁷

Istilah *Ahlul halli wa al-Aqdi* dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka dalam wewangnya untuk melonggarkan dan mengikat suatu aturan. Pradigma pemikiran ulama fiqh merumuskan istilah *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* di dasarkan kepada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan Muhajirin. *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* adalah orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekuen, takwa dan adil, dan

⁵⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.28

⁵⁷ Badri Yatim, *Ibid.*, h.35

kecermelangan pikiran serta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.⁵⁸

Seperti pendapat Rasyid Ridha yang dikutip Suyuthi, *ulil amri* adalah *Ahlul Halli wa al-Aqdi*, mereka yang mendapat kepercayaan dari umat yang terdiri dari para ulama, para pemimpin militer, para pemimpin pekerja untuk kemaslahatan publik seperti pedagang, petani, para pemimin perusahaan, para pemimpin partai politik dan para tokoh wartawan. Al-Razi juga menyamakan pengertian antara *Ahlul Halli wa al-Aqdi* dengan *ulil amri*, yaitu para pemimpin dan penguasa.⁵⁹

Dengan demikian, *Ahlu Halli wa al-Aqdi* dapat di definisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latarbelakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlul halli wa al-Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representasi dari seluruh masyarakat (rakyat) yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

Dari mulai masa pemerintahan khalifah Abu Bakar, semua masalah yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat apabila ia tidak menemukan penyelesaiannya di dalam Al-Quran dan Hadist maka permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika mereka

⁵⁸J. Suyuti Pulungan, *Op.Cit.*, h.66-67

⁵⁹*Ibid.*, h.69.

semua sepakat atas satu keputusan, maka dia pun memutuskan permasalahan tersebut sesuai hasil musyawarah tadi. Begitu pula pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dia mempunyai orang-orang khusus dari ulil amri yang disebut sebagai *Ahlul Halli wa al-Aqdi* untuk melaksanakan musyawarah guna menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan negara dan kemaslahatan umat.⁶⁰

Intuisi musyawarah diwujudkan oleh khalifah Umar bin Khattab menjadi majelis atau lembaga tertinggi sebagai lembaga pemegang kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap keputusan dan peraturan yang dibuat pada masa pemerintahannya diproses melalui musyawarah. Pada masa pemerintahannya dibentuk dua badan penasehat atau syura. Badan penasehat yang satu merupakan sidang umum, yang diundang bersidang bila Negara menghadapi bahaya. Sedangkan yang lainnya adalah badan khusus yang membicarakan masalah rutin dan penting. Bahkan masalah pengangkatan dan pemecatan pegawai sipil serta lainnya dibawa ke badan khusus ini dan keputusannya di patuhi.⁶¹

Khalifah Umar mempunyai satu cara musyawarah yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu terkadang apabila ia menghadapi suatu masalah pertama ia bawa ke sidang musyawarah umum yang dihadiri oleh kaum muslimin untuk mendengarkan pendapat mereka. Kemudian masalah yang sama ia bawa ke sidang khusus yang dihadiri oleh para sahabat nabi yang senior dan cendikiawan untuk mendengarkan pendapat

⁶⁰ Farid Abdul Khalid, *Op.Cit.*, h.78-79

⁶¹ *Ibid.*, h.83

mereka yang terbaik. Umar juga pernah mengizinkan penduduk bermusyawarah untuk memilih calon yang pantas dan jujur menurut pendapat mereka. Hal ini terjadi ketika ia hendak mengangkat pejabat pajak untuk Kufah, Basrah, dan Syria.⁶² Setelah Umar wafat, lembaga syura yang dibentuk oleh Umar segera melakukan rapat untuk menentukan pengganti Umar sesuai dengan amanah Umar bin Khattab.

Utsman dalam memerintah juga mengedepankan musyawarah namun tindakannya cenderung menjurus nepotisme sehingga menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dikemudian hari. Hanya pada saat pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah untuk menggantikan Utsman lembaga Syura yang dibentuk oleh Umar tidak lagi mengadakan musyawarah, namun pengangkatan Ali dilakukan melalui musyawarah oleh orang terdekat dengan keluarganya, dan dalam pemerintahannya Ali juga mengedepankan musyawarah sebagaimana yang telah dilakukan oleh pendahulunya.⁶³

Paradigma pemikiran ulama fikih merumuskan istilah *Ahlul Halli wa al-Aqdi* didasarkan pada sistem pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Ansar dan muhajirin. Mereka ini oleh ulama fikih diklaim sebagai *Ahlul Hall wa al-Aqdi* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun pemilihan Abu Bakar dan Ali dilakukan secara spontan atas dasar tanggung jawab

⁶² J. Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, h.124-125

⁶³ *Ibid*, h.150

terhadap kelangsungan keutuhan umat dan agama. Namun kedua tokoh tersebut mendapat pengakuan dari umat.⁶⁴

Dengan demikian, *Ahlul Halli wa al-Aqdi* terdiri dari berbagai kelompok sosial yang memiliki profesi dan keahlian yang berbeda, baik dari birokrat pemerintahan maupun tidak yang lazim disebut pemimpin formal dan pemimpin informal. Tidak semua pemimpin dan pemuka profesi dan keahlian yang disebut otomatis adalah anggota dari *Ahlul halli wa al-Aqdi*, sebab anggota lembaga ini harus memenuhi kualifikasi. Al-Mawardi dan Rasyid Ridha merumuskan beberapa syarat, yaitu berlaku adil dalam setiap sikap dan tindakan, berilmu pengetahuan, dan memiliki wawasan dan kearifan. Dengan kualifikasi ini diharapkan golongan Ahlul Halli wa al-Aqdi dapat menentukan siapa diantara ahl al-imamah yang pantas menjadi kepala negara menurut syarat-syarat yang ditentukan, dan mampu memegang jabatan itu untuk mengelola urusan negara dan rakyat.⁶⁵

Secara substansial mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi*, diantaranya yaitu:⁶⁶

- a. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah ahl al-ijtihadh dan ahl al-khiyar.
- b. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi

⁶⁴ Badri Yatim, *Op.Cit.*, h.40

⁶⁵ J. Sayuti Pulungan, *Op.Cit.*, h.150

⁶⁶ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, (Bandung: Pustaka Setia,2012), h.255.

orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.

- c. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.
- d. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah para ulama, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
- e. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer, dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dengan demikian, *Ahlul Halli wa al-Aqdi* dapat di definisikan sebagai sebuah lembaga yang berisi tokoh masyarakat dari berbagai latarbelakang yang diberi kewenangan untuk memilih seorang khalifah atau pemimpin bagi umat Islam. Lembaga ini juga berhak membuat ketentuan mengenai syarat seseorang yang boleh dipilih sebagai khalifah atau pemimpin. Dalam terminologi politik *Ahlu Halli wa al-Aqdi* adalah dewan perwakilan rakyat (lembaga legislatif) sebagai representatif dari seluruh masyarakat yang akan memilih kepala negara serta menampung dan melaksanakan aspirasi rakyat.

2. Dasar Hukum *Ahlul Halli wa al-Aqdi*

Bila Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan *Ahlul al-Halli wa al-Aqdi* atau Dewa Perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fiqh kita di bidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam Al-Quran yang disebut dengan “*ulil amri*” dalam firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء: ٥٩)

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs. Annisa, 4: 59).⁶⁷

Juga dalam firman-Nya:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى
أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٣﴾ (النساء: ٨٣)

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan ulil Amri). kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu). (Qs. Annisa, 4: 83).⁶⁸

Dasar sebutan ini juga ada dalam mereka yang disebut dengan umat dalam firman-Nya:

وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ (ال عمران: ١٠٤)

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan rakyat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung.” (Qs. Ali Imran, 3:104).⁶⁹

Tradisi musyawarah dipraktekkan pula oleh para sahabat, khususnya para *khulafa al Rasyidin* pada masa kepemimpinan mereka serta digunakan pula oleh *Ahlul Hall wa al-Aqdidi* dalam mengambil kebijakan untuk memutuskan sesuatu hal. Islam melalui bahasa wahyu Al-Quran menggunakan istilah Syura/Musyawah, yang dijadikan sebagai landasan utama dalam kemasyarakatan. Secara tegas disebut dalam (Qs. Asy-Syura 42:38).

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾ (الشعرا: ٣٨)

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

⁶⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.(Qs. Asy-Syura 42:38).⁷⁰

Juga firmanNya Qs. Ali Imran 159

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
تُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾ (ال عمران: ١٥٩)

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.(Qs. Ali Imran 159).⁷¹

Kata *Syura* berasal dari akar kata *Sya-wa-ra*, artinya mengeluarkan madu dari sarang lebah.⁷² Kemudian dalam istilah di Indonesia disebut musyawarah. Artinya segala sesuatu yang diambil/dikeluarkan dari yang lain (dalam forum berunding) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.⁷³

Al-Quran menggunakan kata *syura* dalam tiga ayat, yang pertama yaitu surat *al-Baqarah*, 2:223 yang membicarakan tentang kesepakatan

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2005).

⁷² Ibn Manzhur, *Lisan al-`Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1968), Jilid 4, h.434.

⁷³Muhammad Iqbal, *Op.Cit.*, h.214

(musyawarah) antara suami istri dalam menyapih anak sebelum dua tahun. Selanjutnya surat *Ali-Imran 3:159* dan *asy-Syura 42:38* yang berbicara lebih umum dalam konteks yang lebih luas. Dalam surat Ali-Imran, 3:159, Allah memerintahkan kepada Nabi Saw untuk melakukan musyawarah dengan para sahabat.⁷⁴ Format musyawarah dan objeknya yang bersifat teknis, diserahkan kepada umat islam untuk merekayasa hal tersebut berdasarkan kepentingan dan kebutuhan sejauh tidak melanggar batasan-batasan yang ditentukan-Nya dalam Al-Quran. Agar prinsip syura ini dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan Allah. Dalam bermusyawarahpun harus mem-pertimbangkan tiga hal, yaitu: masalah apa saja yang akan di musyawarahkan, dengan siapa musyawarah dilakukan serta bagaimana etika dan cara musyawarah dilakukan.⁷⁵

Dalam hal bernegara tentu ada istilah yang disebut lembaga perwakilan rakyat, adanya lembaga ini untuk mewakili rakyat yang salah satu tugasnya yaitu menampung aspirasi rakyatnya. Dalam Islam konsep lembaga perwakilan rakyat dibagi menjadi tiga yakni *Imamah, Ahl Ahlu al-Halli wa al-Aqdi*, dan *Wizarah*.

Al-Mawardi menyebutkan *Ahlu al-Halli wa Al-Aqdi* dengan *al Ikhtiyar*, karena merekalah yang berhak memilih khalifah. Adapun Ibn Taimiyah menyebutkan dengan *Ahlul-syawkah*. sebagian lagi menyebutkan *ahl al-syura* atau *al-ijma*, sementara al-Baghdadi menamakan mereka dengan *Al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada

⁷⁴*Ibid.*,

⁷⁵*Ibid.*, h. 220

pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijaksanaan pemerintahan demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka”.⁷⁶

Keberadaan *Ahlu al-Halli wa Al-Aqdi* ini mempunyai tugas dan wewenang diantaranya adalah bermusyawarah dalam perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam terutama Al-Quran dan Hadist dan melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin tertinggi dalam Negara serta tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap satu hak dari hak-hak Allah.⁷⁷ Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dimana kemaslahatan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (kemaslahatan) atau menghindarkan dari keburukan (kemudharatan) bagi manusia.⁷⁸

Dalam konteks saat ini keberadaan *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* dapat dikatakan sama dengan badan legislatif karena dapat dilihat dari persamaan tugas dan wewenang yang dimiliki yaitu sama-sama membuat

⁷⁶ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr), h.5.

⁷⁷ Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.80.

⁷⁸ Mohammad Rusfi, “Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, Jurnal Al-‘Adalah Vol.XII No.1, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.64. (Online), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pada pukul 20.22 Wib

peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat (rakyat). Maka dari itu untuk mengetahui lebih lanjut, akan penulis paparkan tentang *Ahlu al-Halli wa al-Aqdi* di sub bab selanjutnya.

3. Tugas dan Wewenang *Ahlul Hall wa al-Aqdi*

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa di dalam Islam, kekuasaan (kedaulatan) ada ditangan umat, yang diselenggarakan oleh *Ahlul Hall wa al-Aqdi*. Kelompok ini mempunyai wewenang untuk mengangkat khalifah dan para imam, juga untuk memberhentikannya.

Tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat dan tidak bertabrakan dengan salah satu dari dasar-dasar syariat yang baku, melaksanakan peran konstitusi dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintahan dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap suatu hak dari hak-hak Allah.⁷⁹

Dari uraian para ulama tentang *Ahlul Hall wa al-Aqdi* ini tampak tugas dan wewenang nya sebagai berikut:⁸⁰

- a. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membaiai imam.

⁷⁹ Farid Abdul Khaliq, *Op. Cit*, h. 80.

⁸⁰ H. A. Djazuli, *Op.Cit*. h.76

- b. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada kemaslahatan.
- c. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
- d. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* menjadi tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya.
- e. *Ahlul Halli wa al-Aqdi* menjadi pengawas dalam berjalannya pemerintahan.

Didalam tugas dan wewenang *Ahlul Halli wa al-Aqdi* yang telah di jelaskan diatas, mempunyai kemiripan tugas dan wewenang dengan MPR dan DPR, yaitu wewenang nomor 1 dan 2 sama kewenangannya dengan MPR serta wewenang nomor 3 dan 5 sama kewenangannya dengan DPR dan wewenang nomor 4 adalah wewenang DPA di Indonesia sebelum amandemen UUD 1945.

E. Teori Perwakilan

Perwakilan dalam teori modern merupakan hubungan antara penguasa dan massa. Dalam negara yang menggunakan sistem politik demokrasi modern, demokrasi representative menjadi logika berfikir prinsip yang berbeda dengan kerangka kerja demokrasi langsung. Ada beberapa keuntungan ketika demokrasi representative dijalankan dalam suatu negara. Yaitu:

1. Dengan bertambahnya jumlah penduduk baik secara kuantitas maupun kualitas, tentu saja mempersulit untuk merealisasikan demokrasi langsung, sehingga mekanisme sistem perwakilan menjadi penting untuk menghubungkan penguasa dan massa.
2. Negara modern saat ini umumnya memiliki teritori yang tidak kecil, realitas faktual ini tentu saja mempersulit pemerintah untuk menjalankan demokrasi langsung. Untuk itu, mau tidak mau menjalankan demokrasi perwakilan menjadi solusi terbaik
3. Dengan kualitas penduduk yang meningkat menciptakan juga kompleksitas persoalan di ranah publik. Masalah-masalah ini saja harus diselesaikan oleh pemerintah. Namun tidak semua masalah dapat disampaikan secara kolektif karena akan menimbulkan overload tuntutan pada pemerintah yang justru dapat membuat kemandekan kerja.⁸¹

Perwakilan politik merupakan sistem perwakilan yang dianggap paling wajar. Disamping itu beberapa negara merasa bahwa asas *functional or occupational representation* perlu diperhatikan dan sedapat mungkin diakui kepentingannya di samping sistem perwakilan politik, sebagai cara untuk memasukkan sifat profesional ke dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum.⁸²

⁸¹ Leo Agustino, *Perihal Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.93

⁸² *Ibid.*, h.95

F. BPD Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

1. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya di singkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah badan permusyawaratan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi membuat peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa.⁸³

Demi menegaskan peranan Badan Permusyawaratan Desa serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, maka pemerintah Kabupaten Lampung Timur mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 1 juni 2016. Dengan maksud untuk memberikan suatu kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintah Desa.

⁸³A. W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h.35.

2. Struktur Badan Permusyawaratan Desa

Pimpinan BPD terbagi atas satu orang ketua, satu orang wakil ketua, dan satu orang sekretaris. Susunan pimpinan BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung melalui rapat BPD yang diadakan secara khusus. Untuk pertama kali, penyelenggaraan rapat BPD dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.⁸⁴

Dengan masa jabatan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji, dengan dapat dipilih kembali untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.⁸⁵

3. Fungsi, Tugas dan Hak Badan Permusyawaratan Desa

Pada pasal 31 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 BPD mempunyai fungsi untuk:⁸⁶

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

⁸⁴ Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2011), h.67.

⁸⁵ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD, pasal 3.

⁸⁶ Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 31.

Pada pasal 32 Permendagri Nomor 110 tahun 2016 BPD mempunyai tugas untuk:⁸⁷

- a. Menggali aspirasi masyarakat;
- b. Menampung aspirasi masyarakat;
- c. Mengelola aspirasi masyarakat;
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. Membentuk panitia pemilihan kepala desa;
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. Melaksanakan tugas lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara pada Pasal 51 disebutkan hak BPD antara lain:⁸⁸

⁸⁷*Ibid.*, pasal 32.

⁸⁸*Ibid.*, pasal 51.

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Kemudian pada pasal 55, hak anggota BPD untuk:⁸⁹

- a. Mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. Mengajukan pertanyaan;
- c. Menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. Memilih dan dipilih; dan
- e. Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada masa akhir jabatan Kepala Desa, BPD bertugas untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa tentang berakhirnya masa jabatan enam bulan sebelumnya. Kemudian, BPD berhak untuk membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang bersifat mandiri dan tidak berpihak. Panitia ini terdiri dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat desa.⁹⁰

Mengingat kedudukan, kewenangan, serta keuangan desa yang semakin kuat, penyelenggaraan Pemerintah Desa diharapkan lebih akuntabel yang di dukung dengan pengawasan dan keseimbangan antara

⁸⁹*Ibid.*, pasal 55.

⁹⁰Bambang Trisantono Soemantri, *Op.Cit.*, h.70

Pemerintah Desa dan Lembaga Desa. Lembaga Desa, khususnya BPD yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa sehingga harus mempunyai visi dan misi yang sama.⁹¹

Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa dan BPD.⁹²

4. Keanggota Badan Permusyawaratan Desa

Hal yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 di dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu:⁹³

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan Keuangan Desa.

(2) Hal yang paling dasar dalam menetapkan jumlah anggota BPD adalah dengan memperhatikan jumlah penduduk desa yang bersangkutan dengan ketentuan:

⁹¹*Ibid.*, h.70

⁹²*Ibid.*,

⁹³ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD, Pasal 14.

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 jiwa, 5 orang anggota;
- b. 2001 sampai dengan 3000 jiwa, 7 orang anggota;
- c. Lebih dari 3000 jiwa, 9 orang anggota.

Untuk memilih atau menyaring calon anggota BPD maka harus memperhatikan aturan pada Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 13 yang menjelaskan tentang persyaratan calon anggota BPD yaitu:⁹⁴

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- h. Bertempat tinggal di wilayah pemilihan.

⁹⁴ Permendagri Nomor 110 tahun 2016 Tentang BPD, Pasal 13.

BAB III

IMPLEMENTASI PERDA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 08 TAHUN 2016 PASAL 14 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA GUNUNG AGUNG KECAMATAN SEKAMPUNG UDIK KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

A. Gambaran Umum Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung

1. Sejarah Desa Gunung Agung

Atas penuturan pelaku sejarah dan saksi hidup dari warga Gunung Agung, pada awalnya desa Gunung Agung adalah hutan belantara. Konon menurut cerita penduduk desa ini berasal dari desa Gunung Sugih Besar dan sebagian lagi berasal dari Jawa Tengah dan Sumatra Selatan yaitu Semarang, Jogjakarta dan Palembang. Desa ini sudah mulai di huni sejak kurang lebih antara 1965 dan 1970.

Penduduk desa mula-mula Ogan, Jawa, Lampung, kemudian berturut-turut datang suku-suku seperti: Sunda dan Batak. Menurut cerita suku Ogan, orang pertama yang pindah dari Batu Raja ke Sidodadi Gunung Agung adalah Cik Opah dan orang pertama yang lahir di desa Gunung Agung adalah Mustajib yang lahir pada tahun 1969.

Sedangkan kepala Desa yang di alihkan dari Desa Gunung Sugih Besar ke Desa Gunung Agung Baru adalah Cik Opah yang diperkirakan memerintah dari 1966 hingga tahun 1969, kemudian kepala desa berikutnya adalah Abuyani yang mulai memerintah mulai tahun 1969 hingga tahun 1974.

Runtutan kepala desa Gunung Agung dari awal terbentuk hingga saat ini, yaitu:

No.	Nama Kepala <u>Desa</u>	Tahun Memerintah
1.	Cik Opah	1966-1969
2.	Abuyani BS	1969-1974
3.	Joyo Sumarto	1974-1979
4.	Abidulah A	1979-1988
5.	Abuyani Bs	1988-1994
6.	Muhammad Said	1994-2005
7.	Am Kusuma PJS	2005-2006
8.	Sayuto Kuswoyo PJS	2006-2007
9.	Sriyono	2007-2016
10.	Sayuto Kuswoyo	2016-Sekarang

Sumber: Profil Desa Gunung Agung

2. Keadaan Geografis Desa Gunung Agung⁹⁵

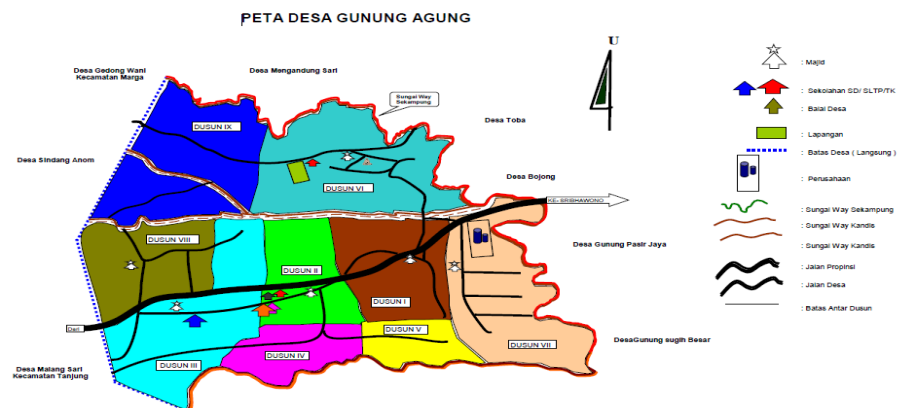
a. Letak dan luas wilayah

Secara Geografis Desa Gunung Agung merupakan salah satu desa dari 15 desa di wilayah Kecamatan Sekampung Udik yang terletak 11 Km arah Timur dari Kecamatan Sekampung Udik yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama 10 menit, Desa Gunung Agung mempunyai luas wilayah mencapai 1.500 Ha. Dengan jumlah penduduk Desa keseluruhan sebanyak 4.078 Jiwa.

Secara topografi Desa Gunung Agung memiliki Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar 882 Ha, dan Desa Gunung Agung memiliki Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 70 mdpl, rata-rata suhu

⁹⁵ RPJMDes Gunung Agung (2016-2021)

udara 26 - 30 °C, Curah Hujan 1.272 mm/thn, Kelembaban udara 28 °C, Kecepatan angin 20 km/jam. Dengan Luas lahan pemukiman 339 Ha, Luas lahan pertanian Sawah 400,75 ha, lahan ladang 284,25 ha, perkebunan 469,50 ha, lahan peternakan 6,50 h.



Sumber: Profil Desa Gunung Agung

Batas wilayah Desa Gunung Agung :

Sebelah Utara	: Desa Mengandung Sari
Sebelah Selatan	: Desa Malang Sari
Sebelah Timur	: Desa Sindang Anom
Sebelah Barat	: Desa Gunung Pasir Jaya

b. Orbitasi

Orbitasi atau jarak tempuh dari pusat-pusat pemerintahan:

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 11 km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 45 km
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 55 km
4. Jarak dari Pusat Pemerintahan Pusat : 230 km

3. Keadaan Demografi Desa Gunung Agung⁹⁶

a. Keadaan Penduduk

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk terutama tentang jumlah, struktur, dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk Desa Gunung Agung adalah 4.078 jiwa dengan komposisi tersaji dalam table berikut:

Dusun	Jumlah Kk	Jiwa Laki-Laki	Jiwa Perempuan	Jumlah Jiwa
I	226	384	344	728
II	168	260	261	521
III	274	429	389	818
IV	79	124	125	249
V	33	73	54	127
VI	158	235	243	478
VII	129	215	223	438
VIII	129	206	188	394
IX	97	186	138	324
JUMLAH	1283	2112	1965	4078

Sumber: Profil Desa Gunung Agung

b. Data Jumlah Dusun, RT, dan RW.

1. Jumlah Dusun : 9 Wilayah
2. Jumlah RW : 9 Wilayah
3. Jumlah RT : 27 Wilayah

⁹⁶ RPJMDes Gunung Agung (2016-2021)

c. Keadaan Sosial⁹⁷

Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun non formal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan. keadaan sosial penduduk Desa Gunung Agung tersaji dalam table berikut.

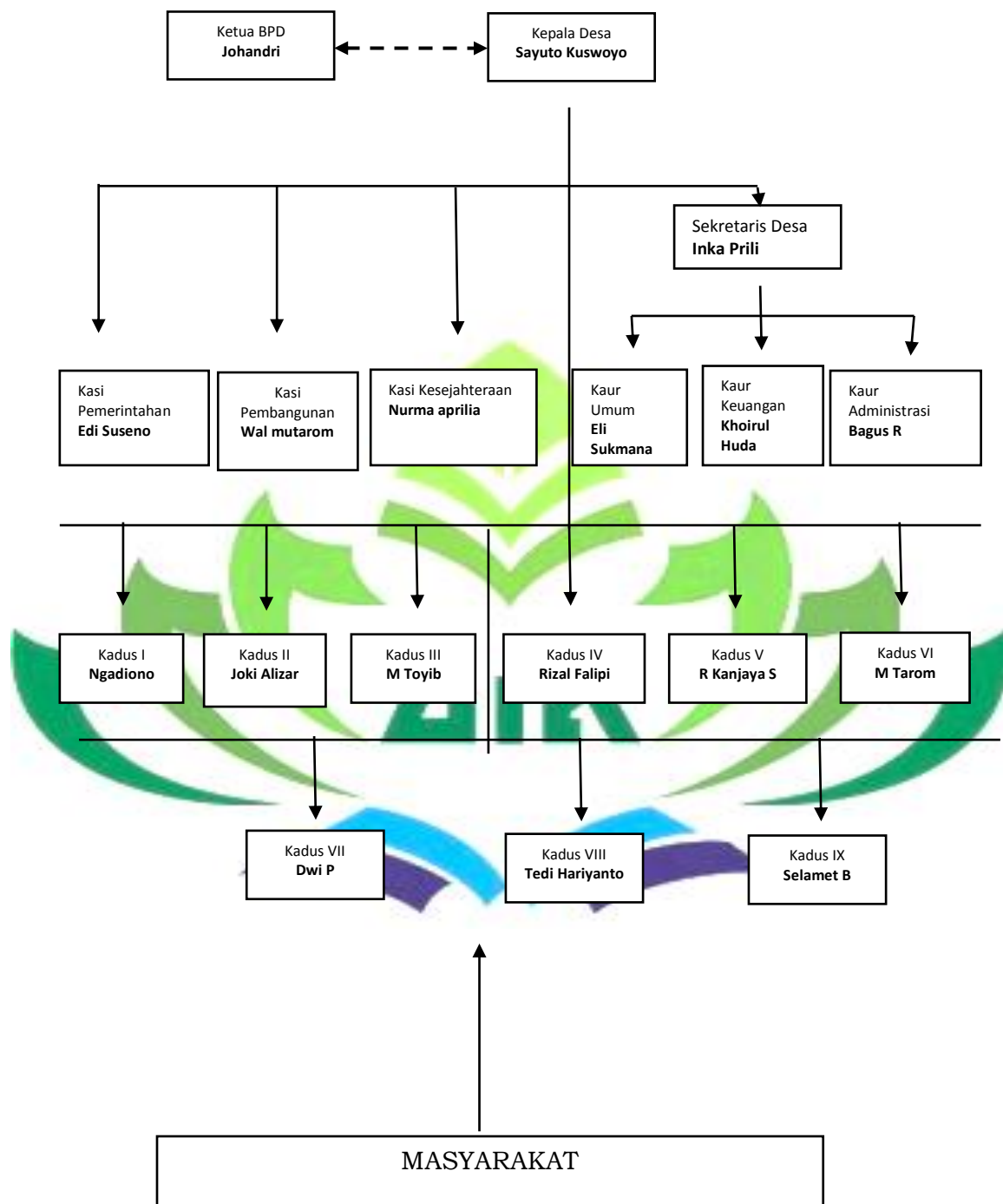
Uraian	Jumlah	Satuan	Ket.
Tingkat Pendidikan			
1. Tidak tamat SD/Tidak Sekolah	-	Jiwa	
2. Tamat SD/Sederajat	1.003	Jiwa	
3. Tamat SMP/Sederajat	782	Jiwa	
4. Tamat SMA/Sederajat	395	Jiwa	
5. Tamat S1 keatas	49	Jiwa	
Agama			
1. Islam	4.070	Jiwa	
2. Kristen Katholik	8	Jiwa	
3. Kristen Protestan	0	Jiwa	
4. Hindu	0	Jiwa	
5. Budha	0	Jiwa	
6. Konghucu	0	Jiwa	

Sumber: Profil Desa Gunung Agung

⁹⁷RPJMDes Gunung Agung (2016-2021)

4. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Agung

a. Struktur Pemerintahan Desa Gunung Agung 2016-2021.⁹⁸



⁹⁸Sayuto Kuswoyo, *Wawancara Kepala Desa Gunung Agung*, Tanggal 26 juni 2019

b. Daftar Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Daftar anggota BPD Desa Gunung Agung 2019-2025 adalah sebagai berikut:⁹⁹

No.	NAMA	JABATAN
1.	JOHANDRI	KETUA
2.	KASUSENO	SEKERTARIS
3.	RUDI HARTONO	BENDAHARA
4.	ANSORI	ANGGOTA
5.	SELAMET S	ANGGOTA
6.	MUJAIS	ANGGOTA
7.	PAIMAN	ANGGOTA
8.	SEKWAN SUSANTO	ANGGOTA
9.	AMIN SUDI	ANGGOTA

B. Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 Tentang Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur.

Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, muncul untuk memperkuat dasar hukum tentang penyelenggaran Pemerintah yang sebelumnya telah di sah kan oleh Presiden melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bagian ketujuh tentang Bandan Permusyawaratan Desa pasal 55.

⁹⁹Johandri, Wawancara Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gunung Agung, Tanggal 26 Oktober 2018.

Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 bagian keempat tentang keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa menjelaskan didalam pasal 14 ayat 1, bahwa Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan desa.¹⁰⁰

Melihat dari persyaratan pemilihan anggotan BPD yang telah disebutkan pada Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa diatas, seharusnya tidaklah sulit untuk dapat menempati posisi sebagai anggota BPD. Namum, dalam pelaksanaanya hasil yang di dapatkan tidak mampu menempatkan seorang perempuan dalam posisi sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Bila melihat dari jumlah penduduk yang bermukim di Desa Gunung Agung, maka akan di dapatkan jumlah penduduk sebesar 4.078 jiwa. Sehingga bila mengikuti aturan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 Tentang BPD pasal 14, Desa Gunung Agung dapat memilih anggota BPD sebanyak 9 orang.¹⁰¹

Dari hasil wawancara yang berlangsung dengan Kepala Dusun 3, mengungkapkan bahwa:¹⁰² Pelaksanaan musyawarah desa telah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 di balai Desa Gunung Agung, yang dihadiri oleh jajaran perangkat desa, tokoh masyarakat, kepala dusun, ketua RT, serta

¹⁰⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD, Pasal 14.

¹⁰¹ Inkaprili, *Wawancara dengan Sekertaris Desa Gunung Agung*, Tanggal 26 juni 2019.

¹⁰² Muhammad Toyib, *Wawancara dengan Kepala Dusun Mbul Joyo Desa Gunung Agung*, 26 Juni 2019.

masyarakat perwakilan dusun. Sebelum adanya musyawarah yang dilakukan pada tanggal 12 februari 2019, kepala desa telah membentuk tim panitia pembentuk BPD sesuai dengan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 di dalam pasal 9, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan masyarakat dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional dengan ditetapkan melalui keputusan Kepala Desa.

Komposisi anggota tim panita pembentuk BPD Desa Gunung Agung berjumlah 3 orang yang berasal dari aparat desa yaitu Bapak Huda, Edy Suseno dan Elisukmana, dan dari pihak masyarakat atau tokoh masyarakat di wakili oleh 6 orang yaitu Bapak turiman, Sugiharto, Edy Winandar, Slamet Ariyanto, Arifin Santoso dan Ulfa Ika sari.¹⁰³

Dari kesepakatan yang telah disepakati oleh Kepala Desa dan panitia pembentuk BPD, maka setiap dusun minimal mencalonkan 2 (dua) orang dari setiap dusunnya, sehingga akan terkumpul 18 orang calon anggota BPD dari 9 dusun yang ada di wilayah Desa Gunung Agung. Lalu tugas masing-masing panitia pembentuk BPD adalah mensosialisasikan adanya pemilihan anggota BPD kepada masyarakat Desa gunung Agung sesuai asal dusunnya masing-masing.¹⁰⁴ Dari ke 18 nama calon yang telah di ajukan kepada panitia pembentuk BPD, lalu akan melalui tahap penyaringan oleh panitia pembentuk BPD Desa Gunung Agung dengan memperhatikan keterwakilan wilayah.¹⁰⁵

¹⁰³ Huda, *Wawancara dengan Ketua Panitia Pembentuk BPD Desa gunung agung*, 27 Juni 2019.

¹⁰⁴ Doni Wijaya, *Wawancara Ketua RT 1 Dusun 5 Desa Gunung Agung*, 26 Juni 2019.

¹⁰⁵ Turiman, *Wawancara dengan Panitia Pembentuk BPD Desa Gunung Agung*, 27 Juni 2019.

Dari ke 18 nama calon tersebut, hanya akan ada 9 orang yang akan menjadi anggota BPD, dikarenakan sesuai dengan aturan yang ada pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 14 ayat (2) .¹⁰⁶

Sebelum adanya pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Gunung Agung yang berlangsung tanggal 12 Februari 2019, masyarakat telah mengajukan nama-nama yang akan di seleksi oleh panitia pembentuk BPD, dari 18 nama calon yang diajukan oleh masyarakat, 3 di antaranya terselip perempuan.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara dengan Bapak Huda selaku ketua dalam panitia pembentuk BPD Desa Gunung Agung, di dapatkan keterangan bahwa: Dari ke 18 calon yang telah di usulkan masyarakat, panitia pembentuk BPD Desa Gunung Agung langsung bekerja untuk mengadakan musyawarah di balai Desa Gunung Agung yang berada di Dusun 6 Sinar Menaung, dengan memanggil para tokoh masyarakat, ketua dusun, ketua RT, aparatur desa, dan perwakilan masyarakat.

Dengan agenda pemilihan anggota BPD pada tanggal 12 Februari 2019, pemilihan anggota dilakukan dengan pemungutan suara oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. Yang akhirnya memunculkan nama-nama yang dipilih oleh masyarakat untuk mengisi jabatan sebagai anggota

¹⁰⁶Tarom, *Wawancara dengan Kepala Dusun Sinar Menaung Desa Gunung Agung*, 26 Juni 2019.

¹⁰⁷Kuncoro, *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Gunung Agung*, 13 Juni 2019.

BPD desa Gunung Agung, yaitu: Johandri, kasuseno, rudi hartono, ansori, selamat sanjaya, mujais, paiman, sekwan susanto, dan awin sudi.¹⁰⁸

Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa belum adanya calon perempuan dalam keanggotaan sebagai anggota BPD dikarenakan kurangnya informasi bahwa di dalam Badan Permusyawaratan Desa harus memperhatikan keterwakilan perempuan, namun dalam kenyataannya masyarakat belum mengetahuinya. Sehingga masyarakat hanya memilih calon yang menurut mereka mampu untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat tanpa mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Sehingga hasilnya pun di dapatkan bahwa yang terpilih adalah laki-laki.

Dalam hal ini juga ditambahkan dengan pernyataan ketua RT 2 Desa Gunung Agung saat di wawancara,¹⁰⁹ menurut beliau, didalam pemilihan calon anggota BPD desa Gunung Agung, kurang dijelaskan oleh panitia pembentuk BPD tentang adanya keterwakilan perempuan di dalam BPD, yang kami pahami bahwa pemilihan anggota BPD hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja yang berbeda adalah pengurangan anggota BPD yang awalnya 11 orang, sekarang menjadi 9 orang, dan panitia hanya menjelaskan bahwa setiap dusun mengajukan calonnya minimal sebanyak 2 orang.

Keterwakilan Perempuan di dalam Badan Permusyawaratan Desa sudah di atur di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdapat pada pasal 58, Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pada pasal 6 dan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016

¹⁰⁸ Huda, *Op.Cit.*, 26 Juni 2019.

¹⁰⁹ Idrus Solihin, *Wawancara Ketua RT 2 Dusun sinar menang Desa Gunung Agung*, 27 Juni 2019.

tentang BPD pada pasal 8. Namun dalam pelaksanaannya di Desa Gunung Agung belum banyak masyarakat yang mengetahui hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi ataupun informasi yang di dapatkan.

Dari hasil wawancara yang penulis dapatkan, menurut bapak Paiman selaku anggota BPD Desa Gunung Agung menerangkan bahwa:¹¹⁰ Pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bukan tidak mensosialisasikan adanya perubahan ataupun penambahan di dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku tentang BPD. Namun menurut beliau, dari segi waktu kurang efektif dikarenakan dari mulai disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang ataupun Perda, hanya 1 kali adanya sosialisasi tentang BPD.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa: kurangnya informasi dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat tentang adanya peraturan baru yang harus memperhatikan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan keuangan desa, sehingga masyarakatpun tidak mengetahui adanya aturan tersebut.¹¹¹

Dari hasil penelitian yang penulis amati di Desa Gunung Agung, masyarakat desa masih lebih mengunggulkan laki-laki, perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi masih ada laki-laki. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika di ajukan perempuan kerap menolak, dengan berbagai macam alasan

¹¹⁰ Paiman, *Wawancara dengan Anggota BPD Desa Gunung Agung*, 26 Juni 2019

¹¹¹ Johandri, *Wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sumber Jaya*, 29 Oktober 2018.

yaitu merasa tidak pantas, malu, belum mempunyai kemampuan ataupun tidak terbiasa di depan publik.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Dusun DM Barat, dalam pencalonan anggota BPD, beliau mengirimkan 2 orang calon bernama mujais dan Edy Lasono, hal ini disebabkan karena bapak edy lasono adalah anggota BPD pada masa jabatan 2012-2018 dan dianggap mampu menjalankan tugasnya dengan baik sehingga di anggap perlu untuk melanjutkan masa jabatannya, sedangkan bapak Mujais adalah mantan kepala dusun yang sudah pasti teruji kepemimpinannya, sehingga masyarakat meminta beliau maju sebagai calon anggota BPD mewakili dusun DM Barat sebagai Anggota BPD.¹¹²

Dilain kesempatan penulis bertanya kepada Bapak Dwi Patmahadi selaku Kepala Dusun Kerta Jaya, tentang tanggapannya tidak mencalonkan perempuan sebagai anggota BPD, dikarnakan kurangnya informasi tentang dasar hukum keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa dan cukup sulit untuk mencari calon anggota BPD dari perempuan.¹¹³

Dari hasil penelitian yang penulis teliti di Desa Gunung Agung mendapatkan hasil bahwa dari struktural penting yang ada di Pemerintahan Desa hampir seluruhnya di pegang oleh laki-laki, hanya segelintir posisi yang di pegang oleh perempuan. Dikarnakan perempuan cenderung untuk memegang jabatan-jabatan yang secara tradisi dilihat sebagai jabatan-jabatan yang lembut (tidak banyak mengeluarkan ide-ide atau gagasan).

¹¹² M.Toyib, *Wawancara Kepala Dusun mbuljoyo Desa Gunung Agung*, 29 Juni 2019.

¹¹³ Dwi, *Wawancara Kepala Dusun kertajaya Desa Gunung Agung*, 29 Juni 2019

Senada dengan hasil wawancara Kasi Kesejahteraan Desa Gunung Agung menjelaskan bahwa:¹¹⁴ Didalam setiap pengambilan keputusan, perempuan hanya menjadi pelengkap dan sebagai pemberi saran di dalam musyawarah. Dan kebanyakan perempuan hanya menyetujuan apa yang telah dihasilkan tanpa mampu memberi gagasan ataupun ide. Kurang dilibatkannya perempuan di dalam musyawarah atau pengambilan keputusan dikarenakan dari sisi kapasitas dan kemampuan di anggap kalah dengan laki-laki.

Dari hasil penelitian penulis di desa Gunung Agung untuk kemampuan keuangan desa membiayai dana operasional BPD, dari keterangan yang didapat dari Kepala Desa Gunung Agung yaitu bapak Sayuto Kuswoyo, untuk dana operasional anggota BPD yang nantinya terpilih, sudah ditetapkan di dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Yaitu sebesar 250.000 Ribu Rupiah per kepala setiap bulannya. Dan untuk dana-dana yang nantinya timbul setelah anggota BPD terpilih, semuanya akan di tanggung di dalam Alokasi Dana Desa.¹¹⁵

¹¹⁴ Nurma Aprilia, *Wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Desa Gunung Agung*, 28 Juni 2019.

¹¹⁵ Sayuto Kuswoyo, *Wawancara dengan Kepala Desa, Desa Gunung Agung*, 28 Juni 2019.

BAB IV

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD DESA GUNUNG AGUNG PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

A. Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14 di dalam Pengisian Keanggotaan BPD Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur

Dari hasil penelitian yang penulis teliti pada Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur, mendapatkan sampel di dalam penelitian ini berjumlah 13 orang, yang terdiri dari kepala dusun 3 orang, ketua RT 2 orang, tokoh masyarakat 2 orang serta aparatur desa 6 orang. Sebelum adanya pemilihan BPD telah disepakati oleh Kepala Desa dan panitia pembentuk BPD untuk setiap dusun diperbolehkan mencalonkan 2 (dua) orang dari setiap dusunnya, sehingga akan terkumpul 18 orang calon anggota BPD dari 6 dusun yang ada di wilayah Desa Gunung Agung.

Dari ke 18 nama calon yang telah di ajukan kepada panitia pembentuk BPD, akan melalui tahap penyaringan oleh panitia pembentuk BPD Desa Gunung Agung dengan memperhatikan Syarat-Syarat yang telah di buat dan disepakati sebelumnya, dari hasil penelitian yang penulis teliti dari ke 18 calon tersebut ada perempuan yang mencalonkan diri didalam bursa pencalonan namun didalam pemilihan Anggota BPD belum ada yang terpilih menjadi anggota BPD. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 58 ayat (1) yaitu jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5

(lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan keuangan Desa. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 pasal 8 ayat (1) yaitu pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan dan Permendagri Nomor 110 tahun 2016 tentang BPD pasal 6 yang berbunyi:

- a. pengisian berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
- b. pengisian berdasarkan keterwakilan perempuan

Menurut Idrus Solihin didalam pemilihan calon anggota BPD desa Gunung Agung, kurang dijelaskan oleh panitia pembentuk BPD tentang adanya keterwakilan perempuan di dalam BPD, yang kami pahami bahwa pemilihan anggota BPD hampir sama seperti sebelumnya, hanya saja yang berbeda adalah pengurangan anggota BPD yang awalnya 11 orang, sekarang menjadi 9 orang.

Sedangkan menurut bapak Paiman selaku anggota BPD Desa Gunung Agung menerangkan bahwa Pemerintah pusat ataupun pemerintah Kabupaten Lampung Timur, bukan tidak mensosialisasikan adanya perubahan ataupun penambahan di dalam hirarki perundang-undangan yang berlaku tentang BPD. Namun menurut beliau, dari segi waktu kurang efektif dikarenakan dari mulai disahkan dan diberlakukannya Undang-Undang ataupun Perda, hanya 1 kali adanya sosialisasi tentang BPD.

Dari hasil yang penulis teliti mengapa tidak adanya keterwakilan perempuan pada BPD Desa Gunung Agung dikarenakan:

1. Kurangnya informasi tentang dasar hukum keterwakilan perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa dan sulit mencari calon anggota BPD dari perempuan.
2. Masyarakat desa masih bercorak patriarkis atau lebih mengunggulkan laki-laki, perempuan dianggap belum cocok menjadi pemimpin selagi masih ada laki-laki. Dalam sistem patriarki yang dianut saat ini, perempuan jarang sekali dicalonkan, bahkan ketika di ajukan perempuan kerap menolak, dengan berbagai macam alasan yaitu merasa tidak pantas, malu, belum mempunyai kemampuan ataupun tidak terbiasa di depan publik.
3. Didalam setiap pengambilan keputusan, perempuan hanya menjadi pelengkap dan sebagai pemberi saran di dalam musyawarah. Dan kebanyakan perempuan hanya menyetujuan apa yang telah dihasilkan tanpa mampu memberi gagasan ataupun ide. Kurang dilibatkannya perempuan di dalam musyawarah atau pengambilan keputusan dikarenakan dari sisi kapasitas dan kemampuan di anggap kalah dengan laki-laki.

Dari keterangan yang didapat dari Kepala Desa Gunung Agung yaitu bapak Sayuto Kuswoyo, untuk dana oprasional anggota BPD yang nantinya terpilih, sudah ditetapkan di dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Yaitu sebesar 250.000 Ribu Rupiah per kepala setiap bulannya. Dan untuk dana-dana yang nantinya timbul setelah anggota BPD terpilih, semuanya akan di tanggung di dalam Alokasi Dana Desa.

**B. Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016
Pasal 14 didalam pengisian keanggotaan BPD Desa Gunung Agung
Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur Perspektif
Fiqh Siyasah**

Para ulama fikih menyebut untuk seseorang yang bertindak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani mereka adalah *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yaitu dapat diartikan sebagai orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat, dengan kata lain adalah lembaga perwakilan yang menampung dan menyalurkan aspirasi atau suara masyarakat. Menurut Al-Mawardi sebagai *ahl al-ikhtiyar* (golongan yang berhak memilih).

Secara substansional mayoritas ulama mempunyai pemahaman yang sama tentang definisi dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi*, diantara yaitu:

1. Sekelompok orang memilih imam atau kepala Negara. Istilah lain dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah *Ahl al-ijtihad* dan *ahl al-khiyar*.
2. Orang-orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Istilah ini dirumuskan oleh ulama fiqh untuk sebutan bagi orang-orang yang berhak sebagai wakil umat untuk menyuarakan hati nurani rakyat.
3. Orang-orang yang mampu menemukan penyelesaian terhadap masalah-masalah yang muncul dengan memakai metode ijtihad. Orang berpengalaman dengan urusan masyarakat, yang melaksanakan kepemimpinan sebagai kepala keluarga, suku atau golongan.

4. *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah para ulama, para kepala, para pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha mewujudkan kemaslahatan masyarakat.
5. Kumpulan orang dari berbagai profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat, yaitu para amir, hakim, ulama, militer dan semua penguasa dan pemimpin yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik.

Dari uraian menurut tokoh ulama diatas dapat disimpulkan bahwa *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* adalah sebuah lembaga perwakilan yang menampung dan meyalurkan aspirasi atau suara masyarakat yang terdiri dari berbagai kalangan dan profesi.

Adapun tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* disamping itu punya hak pilih juga berhak menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Berikut adalah tugas dari *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* yaitu:

1. Memilih dan membaiai pemimpin.
2. Mengarahkan kehidupan masyarakat kepada maslahat.
3. Membuat Undang-Undang yang mengikat seluruh umat didalam hal- hal yang tidak diatur secara tegas oleh Al-Quran dan Hadist.
4. Mengawasi jalannya pemerintahan.

Tugas *Ahlu al-Halli wa al-'Aqdi* juga bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan kemaslahatan umat dan tidak bertabrakan dengan suatu dasar dari dasar-dasar syariat Islam yang baku dan melaksanakan peran konstitusional

dalam memilih pemimpin. Tetapi tugas mereka juga mencakup melaksanakan peran pengawasan yang dilakukan oleh rakyat terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran terhadap hak-hak Allah SWT.

Dan untuk pembahasan kali ini mengenai keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan menurut Fiqh Siyasah, banyak pendapat para ulama mengenai keterwakilan perempuan didalam kepemimpinan khususnya didalam lembaga perwakilan. Namun mayoritas ulama mensyaratkan laki-laki sebagai pemimpin, berdasarkan Nash hadist yang berbunyi: Tidak akan beruntung suatu kaum, jika yang mengurus perkara mereka itu perempuan.

Hadist diatas termasuk hadist-hadist *ahad* (hadis yang hanya diriwayatkan dengan satu riwayat) yang mempunyai bentuk kalimat yang tidak jelas (*zhanni*). Hadist ini disabdakan bertepatan dengan satu kejadian historis tertentu, yakni ketika sampai kepada Rasulullah SAW berita bahwa Persia yang saat itu dalam krisis politik dan dekadensi moral yang saat itu diperintah oleh seorang ratu yang otoriter dan kejam. Pertentangan-pertentangan kekuasaan sampai pada batas perang saudara terus terjadi, sementara peperangan mereka dengan bangsa arab belum berakhir.

Mereka (bangsa Persia) menyerahkan perkara kepemimpinan dan kerajaan mereka kepada anak perempuan kiswa, karena berpegang dengan khayalan-khayalan paganisme, bukan berdasarkan pendapat dan musyawarah, hadist ini gambaran bagi keadaan Persia yang sedang krisis, juga merupakan

firasat hati dalam ketentuan Ilahi berdirinya sebuah negara dan kehancurannya.

Mengangkat dari hadist bahwasanya tidak ada nash nya secara jelas yang melarang keterwakilan perempuan didalam lembaga perwakilan. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan mendahulukan orang yang lebih kompeten daripada yang kurang kompeten, kecuali ada penengah yang bisa disahkan.

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara syara dan logika. Allah SWT berfirman:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (النساء: ٥٨)

(٥٨ : ٤)

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa' (4): 58).

Ibnu Hazm berkata: Ayat diatas ditujukan dengan keumumannya kepada laki-laki dan perempuan, perlu di singgung mengenai hukum tentang pengangkatan perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat yang diberi mandat untuk ikut andil agar mensejahterakan rakyatnya. menarik dari kejadian bangsa Persia bukan terletak pada pengangkatan perempuan menjadi wakil rakyat melainkan dari rusaknya sistem hukum mereka (penduduk Persia) dan tidak menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya, menyerahkan perkara mereka kepada anak perempuan kiswa yang tidak layak untuk dijadikan pemimpin.

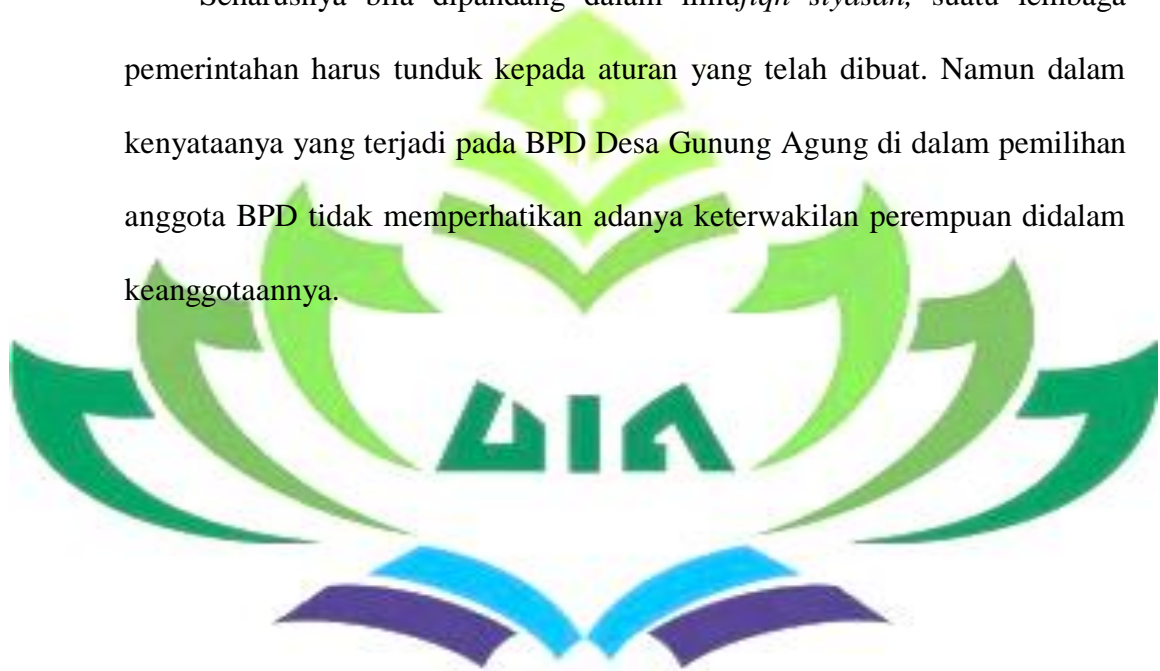
Jadi dapat ditarik kesimpulan sah-sah saja bilamana perempuan dijadikan sebagai pemimpin ataupun wakil rakyat khususnya didalam lembaga perwakilan, tetapi untuk menjadikan perempuan sebagai anggota perwakilan harus mempunyai kompetensi yang memenuhi syarat agar tidak terjadinya kerusakan sistem hukum negara.

Keterwakilan Perempuan pada Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya memilih anggota yang mampu memenuhi persyaratan sebagai calon anggota BPDnamun harus memiliki keberanian dan kapasitas, baik itu pengetahuan maupun keterampilan yang nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat, berupa program-program yang mampu menjawab atas kebutuhan-kebutuhan strategis, sehingga bukan hanya dijadikan sebagai pelengkap ataupun sebagai penggugur kewajiban dalam keterwakilan perempuan, tetapi juga sebagai penggerak dan perancang suatu program

untuk menggerakkan kaum perempuan dalam rangka mendukung setiap tahapan pembangunan desa.

Bila melihat kembali tentang keterwakilan perempuan pada BPD, maka tidak menjadi persoalan apabila perempuan menjadi anggota BPD khususnya di Desa Gunung Agung, karena didalam aturan *fiqh siyasah* tidak melarang seorang perempuan menjadi pemimpin atau wakil rakyat. Didalam perundang-undangan Indonesia pun telah di atur tentang adanya keterwakilan perempuan menduduki jabatan sebagai anggota BPD.

Seharusnya bila dipandang dalam ilmu *fiqh siyasah*, suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat. Namun dalam kenyataanya yang terjadi pada BPD Desa Gunung Agung di dalam pemilihan anggota BPD tidak memperhatikan adanya keterwakilan perempuan didalam keanggotaannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perda Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2016 Pasal 14, didalam pemilihan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, di Desa Gunung Agung Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2019, telah mengikuti aturan yang dibuat di dalam pemilihan anggota BPD, yaitu keterwakilan wilayah, penduduk dan keuangan desa, namun belum dapat menjalankan aturan perundang-undangan tentang keterwakilan perempuan pada BPD Desa Gunung Agung. Dikarenakan dari hasil pemilihan, tidak ada seorang perempuan yang terpilih menjadi anggota BPD. Dari hasil penelitian yang penulis amati bahwa bukan tidak ada perempuan yang mencalonkan diri, tetapi masyarakat di desa Gunung Agung lebih memilih laki-laki untuk menduduki kursi anggota BPD, masyarakatpun kurang mendapatkan informasi tentang aturan keterwakilan perempuan dalam Badan Permusyawaratan Desa.
2. Dari pandangan *fiqh siyasah* seharusnya suatu lembaga pemerintahan harus tunduk kepada aturan yang telah dibuat, serta di dalam Islam pun tidak melarang perempuan menjadi wakil rakyat ataupun pemimpin

sepanjang dia mampu dan mau tanpa paksaan. Pemilihan anggota BPD Desa Gunung Agung belum sepenuhnya menjalankan aturan yang telah dibuat khususnya untuk keterwakilan perempuan, dalam Islam ketika tidak ada keterwakilan perempuan tidak menjadi masalah begitupun ketika ada, Islam memperbolehkan dan membenarkannya, namun bila dilihat dari aturan perundang-undangan aturan tersebut sebatas rekomendasi, dikarenakan tidak adanya pasal sanksi apabila tidak dilaksanakan.

B. Saran

1. Ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar dapat mensosialisasikan kembali tentang keanggotaan didalam BPD.
2. Ditujukan kepada Kepala Desa dan Panitia Pembentuk BPD Desa Gunung Agung untuk dapat menekankan adanya keterwakilan perempuan pada BPD dengan cara setiap dusun diwajibkan mencalonkan 1 (satu) orang perempuan.



DAFTAR PUSTAKA

Agustina Nurhayati, *Konsep Kekuasaan Kepala Negara Dalam Fiqh Siyasah*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, Bandar Lampung, 2014.

Ahmad Wildan dkk, "*Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender*", *Diponegoro Law Journal*, Volume 7 No.1, h.74 (On-line), tersedia di <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>, Diakses pada tanggal 2 September 2018 pada pukul 21.20.

Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Islam dan Barat*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyah*, Dar al-Fikr, Beirut.

Amir syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran Dalam Islam*, CV. Angkasa Raya, Padang, 1990.

A. W. Widjaya, *Pemerintah Desa dan Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1993.

Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung, 2011.

Cholid Narbuko dan Abu Achadi, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, Jakrta 1997.

C.S.T. Kansil, *Pemerintah Daerah Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.

David Crystal, *Penguin Encyclopedia*, Penguin Books, London, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta, 2003.

Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Dar al-Qalam, Damascus, 2007.

Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*, Amzah, Jakarta, 2005.

Hasby Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

Hasyim Abbas, *Presiden Perempuan Perspektif Hukum Islam*, Kutub, Yogyakarta, 2004.

H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, Kencana, Jakarta, 2007.

Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Dar al-Shadir, Beirut, 1968.

- Ikhwan Fauzi, *Perempuan dan Kekuasaan*, Amzah, Jakarta, 2002.
- Imam Amrusi Jailani, dkk., *Hukum Tata Negara Islam*, IAIN Press, Surabaya, 2011.
- Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Lexy J. Noleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet Ke-X, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Muhammad Koderi, *Bolehkah Wanita Menjadi Imam Negara*, Gema Insani Press, Jakarta, 1999.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Ilmu Politik*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, UI Press, Jakarta, 1991.
- Peter Salim, Yeni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Mohammad Rusfi, "Validasi Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Al-'Adalah Vol.XII No.1, (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.64. (Online), tersedia di <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>, Diakses pada tanggal 2 Desember 2018 pada pukul 20.22.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Sopiah Etta Mamang Sanggaadji, *Metode Penelitian*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985.

Wirjono Prodjodikromo, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, Eresco, Bandung, 1971.

Zeni Yusarlis, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Tengkulak*, IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 tahun 2016 tentang BPD

Permendagri Nomer 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa

